

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah kini menjadi salah satu masalah lingkungan yang mendesak di berbagai kota di Indonesia. Kota – kota di Indonesia menghasilkan limbah sampah dengan volume yang sangat besar, berdasarkan data terkini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang di dapat melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sampah nasional yang terdata untuk tahun 2025 mencapai 24,8 juta ton per tahun seperti yang di tuliskan oleh Iqbal et al., (2024). Sampah – sampah yang tidak terkelola dengan baik ini kedepannya berpotensi untuk menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta mengganggu estetika kota. (Yulia, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2018 Sampah sendiri di definisikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang bersifat padat, yang bagi menjadi 3 kategori yakni sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga, dan juga sampah spesifik (Meliana et al., 2023) .

Pertumbuhan penduduk dan terus berjalannya proses urbanisasi yang terus meningkat di wilayah kota memberikan dampak langsung terhadap keseimbangan lingkungan. Mengacu pada artikel Adicita et al., (2022), menurutnya bertambahnya populasi akan berdampak pada peningkatan konsumsi barang dan jasa, peningkatan ini nantinya akan memengaruhi jumlah sampah yang juga naik. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi angka urbanisasi dan aktivitas ekonomi

suatu daerah, maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah yang terus bertambah ini tentunya sulit untuk dikelola dengan baik jika proses penanganannya masih bergantung pada sistem yang lama, yaitu kumpul – angkut – buang. Masalah ini muncul di banyak kota, khususnya di daerah-daerah yang memiliki populasi masyarakat yang padat (Prihatin, 2020)

Sejalan dengan hal tersebut, fenomena yang sama terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, di kota Pekanbaru, bertambahnya penduduk serta kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang signifikan tiap tahunnya (Habibi, 2022). Fenomena yang serupa juga terlihat di kabupaten Aceh Besar, dimana peningkatan jumlah penduduk menuntut peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, dan menimbulkan kendala seperti terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta minimnya partisipasi masyarakat (Yulia, 2021).

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di pulau Bintan dengan di apit beberapa pulau kecil seperti Penyengat dan Dompak. Tanjungpinang sendiri secara administratif memiliki 4 kecamatan dengan luas wilayah sekitar 144,56 kilometer persegi. Sebagai ibu kota provinsi, aktivitas ekonomi Tanjungpinang terus mengalami peningkatan melalui sektor perdagangan, dan hotel yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 28%, peningkatan aktivitas ekonomi ini diiringi dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang signifikan, menyebabkan padatnya penduduk yang menuntut pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, (2024). Berikut ini disajikan data jumlah penduduk yang ada

di 4 kecamatan di Tanjungpinang berdasarkan data yang di ambil dari (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2025)

Tabel 1.1 Jumlah penduduk di kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		2025
1	Tanjungpinang Timur	127.75
2	Bukit Bestari	51.35
3	Tanjungpinang Barat	41.66
4	Tanjungpinang Kota	19.20
	Kota Tanjungpinang	239.96

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2025)

Berdasarkan tabel data dari BPS diatas, jumlah penduduk di kota Tanjungpinang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 239,96 ribu jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Dari total tersebut, kecamatan tanjung timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 127,75 ribu jiwa, diikuti oleh Kecamatan Bukit Bestari sebanyak 51,35 ribu jiwa, Kecamatan Tanjungpinang Barat sebesar 41,66 ribu jiwa, dan Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 19,20 ribu jiwa.

Gambaran kepadatan penduduk ini menunjukkan kecamatan bukit bestari sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas penduduk dan ekonomi yang cukup tinggi setelah kecamatan tanjung pinang timur. Yang mana tentunya berdampak pada meningkatnya volume sampah yang di hasilkan setiap harinya baik dari kegiatan rumah tangga, komersial maupun fasilitas umum. Peningkatan aktivitas ekonomi ini secara langsung menempatkan sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu bidang pelayanan publik yang krusial untuk untuk melihat bagaimana tingkat efektivitasnya, hal ini dikarenakan efektivitas pengelolaan sampah di kota

ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, namun juga menjadi tolak ukur sejauh mana sistem pengelolaan yang dijalankan mampu menangani volume sampah yang terus meningkat (Wira Saputra et al., 2026).

Tabel 1.2 Jumlah timbunan sampah perhari dan tahunan di kota tanjungpinang

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah Harian(ton)	Timbunan Sampah Tahunan(ton)
1	2024	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	155.97	56,930.51
3	2023	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	152,65	55,715.79
4	2022	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	155.91	56,905.36
5	2021	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	151.69	55,366.32
6	2020	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	147.98	54,013.05
7	2019	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	143.53	52,387.65

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2026

Berdasarkan data timbunan sampah dari SIPSN di atas dapat terlihat jika timbunan sampah harian di kota Tanjungpinang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah timbunan sampah harian tercatat sebesar 143,53 ton per harinya, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 147,98 ton per hari, dan kembali naik menjadi 151,69 ton perharinya pada tahun 2021, sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 152,65 ton per hari dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 155,91 ton per hari. Selain itu, timbunan sampah tahunan juga menunjukkan pola yang serupa. Pada tahun 2019 total timbunan sampah tahunan mencapai 52,387,65 ton, meningkat menjadi 54,013,05 ton pada tahun 2020, dan terus naik hingga 55,366,32 ton pada 2021. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 56,905,36 ton, namun menurun kembali menjadi 55,715,79 ton pada tahun 2023.

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Sampah Masuk TPA Kota Tanjungpinang Mei 2026

No	Tanggal	Jumlah Kendaraan	Masuk	Keluar	Isi (Kg)	Isi (Ton)	Volume M ³	Lokasi Penimbunan
1	01/05/2026	38	236.700	163.640	73.060	73,06	292,24	ZONA 3
2	02/05/2026	50	311.650	212.040	99.610	99,61	398,44	ZONA 3
3	03/05/2026	51	320.630	216.470	104.160	104,16	416,64	ZONA 3
4	04/05/2026	45	280.990	184.200	96.790	96,79	387,16	ZONA 3
5	05/05/2026	50	311.970	210.640	101.330	101,33	405,32	ZONA 3
6	06/05/2026	43	268.930	182.730	86.200	86,20	344,80	ZONA 3
7	07/05/2026	52	341.500	214.080	127.480	127,48	509,92	ZONA 3
8	08/05/2026	44	276.480	183.610	92.870	92,87	371,48	ZONA 3
9	09/05/2026	58	356.460	245.120	111.340	111,34	445,36	ZONA 3
10	10/05/2026	43	276.230	186.670	89.560	89,56	358,24	ZONA 3
11	11/05/2026	62	376.220	245.360	130.860	130,86	523,44	ZONA 3
12	12/05/2026	57	347.990	236.100	111.890	111,89	447,56	ZONA 3
13	13/05/2026	51	316.240	210.740	105.500	105,50	422,00	ZONA 3
14	14/05/2026	44	273.130	188.050	85.080	85,08	340,32	ZONA 3
15	15/05/2026	51	339.620	219.120	120.500	120,50	482,00	ZONA 3
16	16/05/2026	50	322.630	213.840	108.790	108,79	435,16	ZONA 3
17	17/05/2026	45	289.450	193.660	95.790	95,79	383,16	ZONA 3
18	18/05/2026	41	251.490	169.420	82.070	82,07	328,28	ZONA 3
19	19/05/2026	47	300.550	202.120	98.430	98,43	393,72	ZONA 3
20	20/05/2026	50	307.000	203.530	103.470	103,47	413,88	ZONA 3
21	21/05/2026	51	320.100	215.000	105.100	105,10	420,40	ZONA 3

22	22/05/2026	44	278.680	185.670	93.010	93,01	372,04	ZONA 3
23	23/05/2026	32	204.000	136.890	67.110	67,11	268,44	ZONA 3
24	24/05/2026	53	333.730	225.670	108.060	108,06	432,24	ZONA 3
25	25/05/2026	58	378.550	244.180	134.370	134,37	537,48	ZONA 3
26	26/05/2026	52	339.990	220.490	118.500	118,50	474,00	ZONA 3
27	27/05/2026	55	0	0	0	0,00	0,00	ZONA 3
28	28/05/2026	52	329.410	221.280	108.130	108,13	432,52	ZONA 3
29	29/05/2026	50	331.380	213.630	117.750	117,75	471,00	ZONA 3
30	30/05/2026	37	236.470	161.270	75.200	75,20	300,80	ZONA 3
31	31/05/2026	60	370.750	241.710	129.040	129,04	516,16	ZONA 3
JUMLAH		1516			3.081.050	3.081,05	12.324,20	

Sumber: DLH Kota Tanjungpinang Mei 2026

Melihat kondisi pertumbuhan sampah dari data yang tersaji ini tentunya menjadikan ini permasalahan serius yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Mengacu pada UUD Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki peluang terbuka untuk melaksanakan kebijakan secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah (Sofianto et al., 2024). Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 mengenai pembagian tugas Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota yang menyatakan bahwa pemerintahan berlandaskan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta keselarasan dalam Penyelenggaraan

pemerintahan daerah, termasuk urusan wajib mendasar seperti pengelolaan lingkungan (Baihaqi & Yustiani, 2026).

Sesuai dengan yang di amanatkan pada UUD Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap pemerintah daerah untuk mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri melalui pembentukan lembaga daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan. Lembaga daerah berperan penting dalam menangani berbagai permasalahan publik, termasuk kebersihan dan pengelolaan lingkungan (Agustiyanti, 2022). Untuk Kota Tanjungpinang sendiri, tanggung jawab ini di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan hingga pemungutan agar sampai ke lokasi pembuangan terakhir. DLH sendiri berfungsi serta penanggung jawab utama untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh proses pengelolaan sampah mulai dari mengumpulkan, mengangkut, serta pengolahan akhir (Sumaryadi, 2005).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Tempat pemrosesan Akhir (TPA) di Ganet, proses pengelolaan sampah yang mereka lakukan menggunakan teknik *controlled landfill* yang dimulai dengan pengangkutan sampah di TPS yang kemudian dibawa ke TPA untuk kemudian ditumpuk, diratakan serta dipadatkan menggunakan alat berat setelah dipilah yang sekiranya bermanfaat oleh pemulung. Setelah proses pemadatan sampah ini nantinya akan ditutup dengan tanah secara berkala guna mengurangi bau menyengat yang timbul. Selain itu TPA Ganet juga memanfaatkan sampah yang didapat untuk dijadikan bahan bakar seperti bensin dan solar menggunakan alat insinerator serta pembuatan

paving block dari sampah plastik dan juga memanfaatkan sampah organik untuk di proses menjadi kompos yang kemudian dijual.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti di beberapa titik wilayah di kecamatan Bukit Bestari. di kawasan pinggiran jalan wilayah kecamatan Bukit Bestari masih terlihat penumpukan sampah, hingga menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Tidak hanya itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah, dimana kesadaran masyarakat untuk memilah sampah belum maksimal, Fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS terlihat belum merata dan cukup, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang memperparah kondisi kebersihan lingkungan (Firdausi, 2024).

Gambar 1. 1 Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan



Sumber: observasi lapangan oleh peneliti di jalan Brigjen Katamso, jalan Pramuka, dan jalan Usman Harun Februari 2026

Berdasarkan pemikiran Duncan dalam Steers (1977), efektivitas organisasi diukur melalui indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan tantangan lingkungan (Gawang, 2023). Melihat dari hasil

observasi yang telah peneliti lakukan, yang mana mengindikasikan permasalahan sampah di Kecamatan Bukit Bestari tidak hanya berhubungan dengan bertambahnya volume sampah, pelayanan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga termasuk bagaimana perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Tanjungpinang di Kecamatan Bukit Bestari jika dilihat melalui indikator yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1977). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Sampah Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (studi di Kecamatan Bukit Bestari)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah padat yang dilakukan oleh DLH Kota Tanjungpinang di kecamatan Bukit Bestari ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah padat oleh DLH Kota Tanjungpinang di kecamatan Bukit Bestari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah padat yang dilakukan oleh DLH Kota Tanjungpinang di Kecamatan Bukit Bestari.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah padat oleh DLH Kota Tanjungpinang di Kecamatan Bukit Bestari.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kajian pada penelitian memiliki manfaat, manfaat pada penelitian ini bersifat teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa yang mengkaji topik serupa dan memperluas cakrawala pengetahuan bagi pembacanya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan yang mengemban tanggung jawab, guna meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang.

- a. Bagi DLH, memberikan masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang lebih efektif.
- c. Bagi Penulis, memberikan pengetahuan serta pengalaman untuk penulis dalam memahami bagaimana mekanisme sistem yang dijalankan oleh DLH dalam mengelola sampah di Kota Tanjungpinang